

SALINAN



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 035/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU

IX. PROPINSI R I A U

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 035/O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/O/1992 tentang Sekolah Menengah Umum dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMU;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-148/U/97 tanggal 7 Februari 1997;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU.**

**BAB I
NOMENKLATUR****Pasal 1**

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Menengah Umum, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMU.

Pasal 2

- (1) Nomenklatur dan penomoran SMU diatur sebagai berikut:
 - a. SMU yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
 - b. SMU yang berlokasi di kotamadia/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
 - c. SMU yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
 - d. SMU yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai dengan nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMU, urutan penomoran SMU ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMU sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMU adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMU dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Kepala.

Pasal 4

SMU mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan umum program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMU mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMU.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMU terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Wakil Kepala; ✓
- c. Urusan Tata Usaha; ✓
- d. Kelompok Jabatan Fungsional. ✓

Pasal 7

Kepala adalah guru mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 8

Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SMU serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala;
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bagan organisasi SMU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMU sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

**BAB V
BIAYA****Pasal 20**

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB VI
LOKASI****Pasal 21**

Sejak ditetapkannya Keputusan ini SMU berjumlah 2.465 dengan rekapitulasi, nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN****Pasal 22**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMU ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0371/O/1978 ✓
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

td

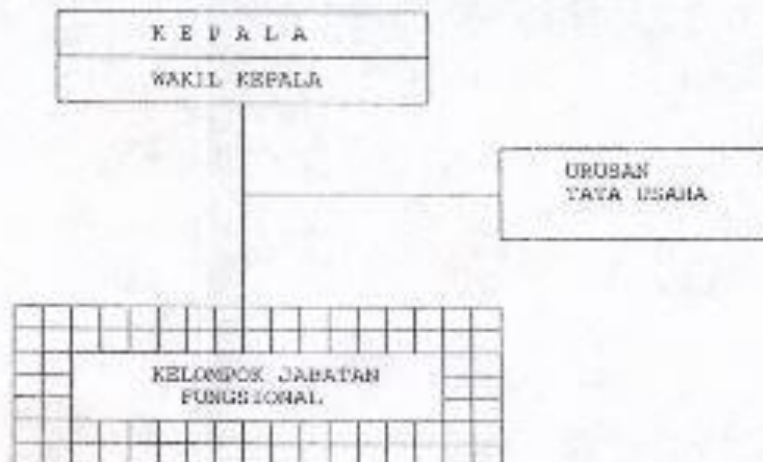
Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

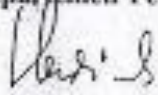

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 035/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMU



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
ttd
Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

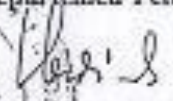

Mardiyah
NIP 130 344 753 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan


Mardiyah
NIP. 130 344 753



SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 035/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

REKAPITULASI
DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN NOMOR SMA MENJADI SMU

No.	PROPINSI	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
1.	DKI Jakarta	115	
2.	Jawa Barat	279	
3.	Jawa Tengah	262	
4.	D I Yogyakarta	60	
5.	Jawa Timur	283	
6.	D.I.Aceh	131	
7.	Sumatera Utara	165	
8.	Sumatera Barat	99	
9.	R i a u	76	
10.	J a m b i	51	
11.	Sumatera Selatan	83	
12.	Lampung	69	
13.	Kalimantan Barat	56	
14.	Kalimantan Tengah	40	
15.	Kalimantan Selatan	47	
16.	Kalimantan Timur	44	
17.	Sulawesi Utara	72	
18.	Sulawesi Tengah	50	
19.	Sulawesi Selatan	151	
20.	Sulawesi Tenggara	44	
21.	Maluku	54	
22.	Bali	46	
23.	Nusa Tenggara Barat	50	
24.	Nusa Tenggara Timur	41	
25.	Irian Jaya	34	
26.	Bengkulu	44	
27.	Timor Timur	19	
	JUMLAH	2.465	

1. PROPINSI RIAU

NO	SEKOLAH ASAL						HASIL PERUBAHAN			
	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN PELDIBAGIAN SEKOLAH		NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH		
		KELAYAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODI/KOTIF	NOMOR DAN TANGGAL	TESTAS		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODI/KOTIF
1	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17242	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/73-05	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	J. JENO HOSANAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
2	SMA NEGERI 2 BANGUNAN 010102	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 2 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
3	SMA NEGERI 1 BATANG 21017	J. DIPA PEGAYAN	BATANG	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BATANG	BATANG	BATANG	KAB. BANGUNAN
4	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 010101	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
5	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17241	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
6	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17243	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
7	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17244	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
8	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17245	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
9	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17246	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
10	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17247	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
11	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17248	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
12	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17249	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
13	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17250	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
14	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17251	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
15	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17252	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
16	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17253	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
17	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17254	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
18	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17255	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
19	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17256	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN
20	SMA NEGERI 1 BANGUNAN 17257	J. JOHO GUMAYAH	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN	0040/001/01-01-81	PERANGKAT	SMA NEGERI 1 BANGUNAN	BANGUNAN	BANGUNAN	KAB. BANGUNAN

1. PROPINSI RIAU

NO	SEKOLAH RASMI					HASIL PERUBAHAN			
	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH		KEPUTUSAN PELEMBAGAN SEKOLAH		NAMA SEKOLAH	LOKASI BARU		
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTAH	NOMOR DAN TANGGAL		ESTAS	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN
21	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 01/11/82	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
22	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SEKOLAH	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0471000 22/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
23	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0471000 22/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
24	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 11/04/82	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
25	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 20/04/82	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
26	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 05/10/84	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
27	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 20/04/82	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
28	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
29	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
30	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
31	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
32	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
33	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
34	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
35	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
36	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
37	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
38	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
39	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU
40	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI 23100	SMA	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU	0470003 21/11/85	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 BUKIT MURNI	BUKIT MURNI	KAB. BENGKALU

No	SEKOLAH ASAL						HASIL PENERIMAAN			
	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN PELEMBAGAAN SEKOLAH		NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH		
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KOTA/KOTAPRIBADI	NOMOR DAN TANGGAL	TENTANG		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KOTA/KOTAPRIBADI
1	SDN NONGI 2 NONGI 170011	JL. GEMANG SAN PURAHANG NONGI	NONGI	KAB. BOGOR	001/0001/00-11/01	PENERBITAN	SDN NONGI 2 NONGI	JL. GEMANG SAN PURAHANG NONGI	NONGI	KAB. BOGOR
2	SDN NONGI 3 NONGI 170011	TEUK PINANG	TEUK PINANG	KAB. BOGOR	001/0001/11-00/01	PENERBITAN	SDN NONGI 3 NONGI NONGI	TEUK PINANG	TEUK PINANG	KAB. BOGOR
3	SDN NONGI 1 TEMBAKAWA 170011	JL. PENDINGAN	TEMAKAWA	KAB. BOGOR	001/0001/20-01/01	DK	SDN NONGI 1 TEMBAKAWA	JL. PENDINGAN	TEMAKAWA	KAB. BOGOR
4	SDN NONGI 2 TEMBAKAWA 170011	JL. SAPTA HARSA	TEMAKAWA	KAB. BOGOR	001/0001/09-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 2 TEMBAKAWA	JL. SAPTA HARSA	TEMAKAWA	KAB. BOGOR
5	SDN NONGI 1 GATIK 170011	JL. PENDINGAN	GATIK	KAB. BOGOR	001/0001/05-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 1 GATIK	JL. PENDINGAN	GATIK	KAB. BOGOR
6	SDN NONGI 10000 KUNCI 170011	JL. PARTI POLARISIRANG	NETE	KAB. BOGOR	001/0001/20-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 10000 KUNCI	JL. PARTI POLARISIRANG	NETE	KAB. BOGOR
7	SDN NONGI 1 TAMBAKAWA 170011	JL. PENDINGAN	TAMBAKAWA	KAB. BOGOR	001/0001/20-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 1 TAMBAKAWA	JL. PENDINGAN	TAMBAKAWA	KAB. BOGOR
8	SDN NONGI 3 SUNGAI 170011	JL. PUSIR SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 3 SUNGAI	JL. PUSIR SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
9	SDN NONGI 1 SUNGAI 170011	SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/10-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 1 SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
10	SDN NONGI 2 TAWUNG 170011	JL. TAWUNG PINANG	TAWUNG PINANG	KAB. BOGOR	001/0001/20-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 2 TAWUNG PINANG	JL. TAWUNG PINANG	TAWUNG PINANG	KAB. BOGOR
11	SDN NONGI 4 TAWUNG PINANG 170011	JL. BUKIT BANGUN	TAWUNG PINANG	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 4 TAWUNG PINANG	JL. BUKIT BANGUN	TAWUNG PINANG	KAB. BOGOR
12	SDN NONGI 3 TAWUNG PINANG 170011	JL. DUDA BANGUN	TAWUNG PINANG	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 3 TAWUNG PINANG	JL. DUDA BANGUN	TAWUNG PINANG	KAB. BOGOR
13	SDN NONGI 2 TAWUNG 170011	JL. BUKIT BANGUN	TAWUNG PINANG	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 2 TAWUNG PINANG	JL. BUKIT BANGUN	TAWUNG PINANG	KAB. BOGOR
14	SDN NONGI 5 TAWUNG PINANG 170011	JL. POKON BANGUN	TAWUNG PINANG	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	AULI FERISSA	SDN NONGI 5 TAWUNG PINANG	JL. POKON BANGUN	TAWUNG PINANG	KAB. BOGOR
15	SDN NONGI 2 PEKAYANGAN 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	PEKAYANGAN	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 2 PEKAYANGAN	JL. SUNGAI SUNGAI	PEKAYANGAN	KAB. BOGOR
16	SDN NONGI 5 PEKAYANGAN 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	PEKAYANGAN	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 5 PEKAYANGAN	JL. SUNGAI SUNGAI	PEKAYANGAN	KAB. BOGOR
17	SDN NONGI 1 PEKAYANGAN 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	PEKAYANGAN	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	DK	SDN NONGI 1 PEKAYANGAN	JL. SUNGAI SUNGAI	PEKAYANGAN	KAB. BOGOR
18	SDN NONGI 7 PEKAYANGAN 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	PEKAYANGAN	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 7 PEKAYANGAN	JL. SUNGAI SUNGAI	PEKAYANGAN	KAB. BOGOR
19	SDN NONGI 3 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 3 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
20	SDN NONGI 4 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 4 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
21	SDN NONGI 6 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 6 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
22	SDN NONGI 8 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 8 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
23	SDN NONGI 9 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 9 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
24	SDN NONGI 10 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 10 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
25	SDN NONGI 11 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 11 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
26	SDN NONGI 12 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 12 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
27	SDN NONGI 13 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 13 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
28	SDN NONGI 14 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 14 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
29	SDN NONGI 15 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 15 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
30	SDN NONGI 16 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 16 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
31	SDN NONGI 17 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 17 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
32	SDN NONGI 18 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 18 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
33	SDN NONGI 19 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 19 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
34	SDN NONGI 20 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 20 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
35	SDN NONGI 21 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 21 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
36	SDN NONGI 22 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 22 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
37	SDN NONGI 23 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 23 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
38	SDN NONGI 24 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 24 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
39	SDN NONGI 25 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 25 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
40	SDN NONGI 26 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 26 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
41	SDN NONGI 27 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 27 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
42	SDN NONGI 28 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 28 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
43	SDN NONGI 29 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 29 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR
44	SDN NONGI 30 SUNGAI 170011	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR	001/0001/00-01/01	PENERBITAN	SDN NONGI 30 SUNGAI	JL. SUNGAI SUNGAI	SUNGAI SUNGAI	KAB. BOGOR

NO	SEKOLAH ASAL					HASIL PERUBAHAN				
	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN PELEMBAGAN SEKOLAH		NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH		
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KOTA/KANTON	NO/TAHUN	TANGGAL		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KOTA/KANTON
1	DWA NUCEN 4 PEKANTAN 010408	J. BUKIT BAYAN	BUKIT BAYAN	KOTA PEKANTAN	KEPUTUSAN 11/04/08	PENYUSUNAN	DWA NUCEN 10 PEKANTAN	J. BUKIT BAYAN	BUKIT BAYAN	KOTA PEKANTAN
1	DWA NUCEN 11 PEKANTAN 010408	J. SEKAR GELAH	BUKIT BAYAN	KOTA PEKANTAN	KEPUTUSAN 28/03/08	PENYUSUNAN	DWA NUCEN 11 PEKANTAN	J. SEKAR GELAH	BUKIT BAYAN	KOTA PEKANTAN
1	DWA NUCEN 1 SATAM KATAM 010408	BEKAWANG PANGANG	BEKAWANG PANGANG	KOTA SATAM	KEPUTUSAN 14/04/08	PENYUSUNAN	DWA NUCEN 1 SATAM	BEKAWANG PANGANG	BEKAWANG PANGANG	KOTA SATAM
1	DWA NUCEN 3 SATAM 010408	J. K. SUPRATTA SATAM	SATAM KATAM	KOTA SATAM	KEPUTUSAN 20/04/08	PENYUSUNAN	DWA NUCEN 3 SATAM	J. K. SUPRATTA SATAM	SATAM KATAM	KOTA SATAM



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Binaan dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

[Handwritten Signature]
Mardiah
NIP. 020344352